

PENGELOLAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA(BSPS) DALAM PEMBANGUNAN RUMAH NELAYAN PESISIR

**(STUDI DI DESA SUTERA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG
UTARA)**

Oleh :

Mirnawati

NIM.E1022171062

Hasan Almutahar

NIP.195208041978031001

Nurwijayanto

NIP.196708182007011001

Email : Mirnawati29@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Mirnawati, Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Pembangunan Rumah Nelayan Pesisir di Desa Sutera Kabupaten Kayong Utara, Skripsi Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak 2021.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan di lapangan tentang pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam pembangunan rumah nelayan pesisir. Teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teori perubahan sosial, Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan metode kualitatif. Penentuan dalam informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Subjek dari penelitian ini yaitu masyarakat nelayan pesisir yang menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil

penelitiandilapangandianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif dengan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa adanya perubahan rumah masyarakat nelayan pesisir yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu perubahan kondisi rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, perubahan pola pikir dan pola perilaku masyarakat nelayan pesisir. Hasil penelitian ini bahwa dalam pemberian bantuan merupakan upaya di Desa Sutura menjadikan masyarakat nelayan pesisir lebih sejahtera dari sebelumnya.

Kata kunci : Masyarakat nelayan pesisir, Kemiskinan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)



Abstract

Mirnawati, The Management of The Self-Housing Stimulant Assistance in the Construction of Coastal Fishermen's House in Sutera Village Kayong Utara Regency. Thesis of Social Development Study Program, Social and Political Science Faculty, Universitas Tanjungpura Pontianak 2021.

This study aimed to reveal the reality in the field about the management of Self-Housing Stimulant Assistance in the construction of coastal fishermen's houses. This study used the social change theory. This research design was descriptive using a qualitative research method. Determining the informant in this research used purposive sampling. The research subject was the coastal fishing communities that received the Self-Housing Stimulant Assistance. The techniques of data collection were observation, interview, and documentation with the techniques of data analysis were data reduction, data display, and data verification. The results showed that there was a change in the coastal fishermen's houses who received the Self-Housing Stimulant Assistance, such as changes in the condition of uninhabitable houses to fit for habitation, changes in the mindset, and behavior patterns of coastal fishing communities. The results also showed that providing assistance was an attempt in Sutera Village to make coastal fishing communities more prosperous than before.

Keywords: *Coastal Fishing Communities, Poverty, Self-Housing Stimulant Assistance.*

A. Pendahuluan

Perbaikan adalah siklus perubahan yang menggabungkan setiap kerangka kerja ramah, seperti masalah legislatif, ekonomi, yayasana, penjaga, pembelajaran dan inovasi, pendirian, dan budaya (Alexander 1994).Portes (1976) mencirikan perbaikan sebagai perubahan finansial, sosial dan budaya. Pada awalnya, pemikiran tentang kemajuan sering dijumpai dengan pemikiran-pemikiran yang membedakan kemajuan dengan pembangunan, kemajuan dengan modernisasi dan industrialisasi, khususnya kemajuan dengan westernisasi. Banyaknya pemikiran ini tergantung pada bagian-bagian dari perubahan kemajuan.

Selain itu, kemajuan dan modernisasi dan industrialisasi, secara keseluruhan mengandung komponen-komponen kemajuan, namun keempat hal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok, karena masing-masing memiliki landasan, pedoman dan sifat yang berbeda serta berbagai standar kesesuaian, meskipun setiap salah satunya adalah struktur yang mencerminkan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Seperti yang ditunjukkan oleh Deddy T. Tikson (2005) bahwa perbaikan juga dapat diartikan sebagai perubahan

finansial, sosial dan budaya yang disengaja melalui pengaturan dan prosedur menuju arah yang ideal.

Perubahan konstruksi ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau perkembangan pesat penciptaan di bidang modern dan administrasi, dengan tujuan agar komitmen mereka terhadap pembayaran publik semakin besar.

Kemudian, komitmen kawasan hortikultura akan berkurang dan sebaliknya seiring dengan perkembangan industrialisasi dan modernisasi moneter. Perubahan sosial dapat dilihat melalui penyebaran kelimpahan melalui penerimaan yang adil terhadap aset keuangan, seperti pendidikan, kesejahteraan, penginapan, air bersih, tempat liburan, dan dukungan dalam siklus dinamis politik. Sedangkan perubahan sosial secara teratur berkaitan dengan naiknya jiwa patriotisme, meskipun perubahan kualitas dan standar yang dianut masyarakat, seperti perubahan dari mistisisme ke realisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian tinggi ke dominasi material, dari pendirian konvensional ke asosiasi dan objektif, siklus perbaikan terjadi di semua bagian kehidupan daerah, keuangan, sosial, budaya, politik, yang terjadi pada skala

penuh (publik) dan miniatur (daerah/kelompok lokal). Bagian penting dari kemajuan adalah pengembangan dan perluasan. Bantuan Stimulan Perumahan Perbaikan Diri (BSPS) adalah bantuan dari otoritas publik untuk jaringan berbayar rendah untuk memberdayakan dan memperluas kepercayaan dalam mengerjakan sifat rumah dan membangun rumah baru dan kerangka kerja, kantor, dan utilitasnya. Kabupaten Kayong Utara telah mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), salah satunya adalah penginapan pemancing untuk daerah setempat dari tahun 2019 hingga 2020. Bantuan BSPS berupa 50 rumah untuk pemancing.

Dari persepsi yang mendasarinya, para pengamat melihat ada kejanggalan dalam pelaksanaan program administrasi ini, lebih spesifiknya, penundaan pelaksanaan perbaikan karena tidak adanya pengawasan dari organisasi terkait, seperti halnya tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, serta mengenali atau mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan.

Kemudian lagi, kendala di lapangan, misalnya tidak adanya pembenahan diri dari penerima manfaat, penyebaran materi tidak sesuai kesepakatan dengan penerima manfaat, resistensi antar individu dan perkumpulan,

biaya bahan bangunan yang tiba-tiba naik dan rumah-rumah yang diberikan tidak sesuai dengan pemancing di dekatnya. Kabupaten Kayong Utara, maka pada saat itu di lapangan masih ada oknum-oknum tertentu yang belum mampu mengakui program BSPS karena sebenarnya mereka memiliki hubungan keluarga dengan fasilitator. Ada tiga komponen penting dan langsung yang membantu pelaksanaan, lebih spesifiknya, adanya proyek (pendekatan) yang dilakukan, temu lokal yang menjadi tujuan dan manfaat dari program perubahan dan perbaikan, komponen pelaksanaan yang baik, kedua asosiasi tersebut dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan administrasi dan manajemen siklus eksekusi itu.

Rumah yang disediakan oleh pemerintah sangat sedikit sedangkan nelayan yang ada di Desa sutera banyak dan ada pentuan dalam mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSP) yaitu nelayan yang berumur 50 tahun keatas saja yang berhak mendapat Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BPSP) sedangkan nelayan yang muda tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut, sehingga terjadilah kecemburuan sosial antara nelayan yang mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSP) dengan nelayan yang tidak mendapatkan bantuan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah adalah kemiskinan, dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut, kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk memenuhi kebutuhan hidup individu maupun kelompok. Seseorang mengalami kemiskinan karena berbagai faktor yaitu keterbatasan akses, pendapatan rendah, kondisi yang rentan terhadap penyakit, tidak memiliki skill dalam bekerja dan ilmu pengetahuan yang kurang. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu keperluan dasar manusia, dan memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang mendatang. Permasalahan rumah yang tidak layak huni merupakan salah satu permasalahan sosial yang lekat dalam kehidupan perdesaan maupun perkotaan. Rumah tidak layak huni menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi standar layak huni yaitu luas rumah dan kualitas dan kesehatan rumah.

Total rumah tidak layak huni di Indonesia hingga saat ini tidak kurang dari 4,8 juta unit. Sebagai upaya pemerintah

untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni, pemerintah pusat, kementerian perumahan rakyat merancang program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Menargetkan sasaran ini sebanyak 50 rumah khususnya rumah nelayan pesisir yang ada di Desa Sutera Kabupaten Kayong Utara pemerintah memberikan dana sebesar Rp.10.000.000 untuk membeli bahan bangunan rumah tetapi dana yang diberikan masih sangat kurang dengan dana RP.10.000.000 hanya dapat membeli semen dan perbaikan jendela dan pintu saja. Sehingga banyak masyarakat nelayan pesisir harus berutang di toko bangunan agar bisa membangun rumah mereka karena dana yang di berikan pemerintah masih sangat kurang sehingga menyulitkan masyarakat nelayan pesisir. program yang tidak di sosialisasikan sehingga tidak sesuai dengan perencanaan yang awalnya dengan program ini pemerintah bisa mensejahterakan masyarakat nelayan pesisir tetapi malah sebaliknya menjadikan nelayan pesisir banyak hutang karena harus membeli bahan bangunan yang kurang dengan uang mereka sendiri.

Penerima diperlukan untuk memenuhi organisasi dan kondisi yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja, khususnya penduduk Indonesia, berpasang-pasangan,

bertempat tinggal di rumah induknya dalam kondisi tidak layak, belum pernah melewati atau mendapat bantuan yang sebanding, memiliki upah maksimum dengan gaji terendah yang diizinkan oleh hukum, jatuh tempo 50 tahun ke atas, dan memiliki organisasi total.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini bertujuan untuk menstimulan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk membangun atau memperbaiki rumah masing-masing dengan bantuan dana untuk membeli bahan bangunan yang diberikan pemerintah. Manfaat dari program ini diharapkan mampu mendorong masyarakat yang miskin agar meningkatkan kualitas hidupnya khususnya rumah mereka sendiri yang tidak huni, namun dibalik permasalahan terjadi, dengan adanya program ini masyarakat sangat terbantu meskipun tidak sepenuhnya, dan juga memberikan perubahan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni di Desa Sutera Kabupaten Kayong Utara.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis merasa tertarik melakukan penelitian sebagai berikut “Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Pembangunan Rumah Nelayan Pesisir di Desa Sutera Kabupaten Kayong Utara

B. Tinjau Pustaka Konsep

1. Pengertian Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bantuan Stimulan perumahan swadaya (BSPS) ialah dorongan dari pemerintah untuk warga berpenghasilan rendah buat mendesak serta tingkatan keswadayaan dalam kenaikan mutu rumah serta pembangunan baru rumah serta prasarana, fasilitas serta utilitasnya. Rumah swadaya bersumber pada undang-undang Nomor.1 tahun 2011 tentang perumahan serta kawasan permukiman bisa dimaksud selaku rumah yang dibentuk atas prakarsa serta upaya warga itu sendiri. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan sarana pemerintah berbentuk dorongan stimulan buat pembangunan/kenaikan kualitas rumah kepada warga yang berpenghasilan rendah (MBR). MBR merupakan warga yang memiliki keterbatasan energi beli sehingga butuh memperoleh support pemerintah buat mendapatkan rumah yang layak huni.

Peningkatan mutu (PK) adalah tindakan perbaikan bagian-bagian rumah untuk meningkatkan/memenuhi prasyarat rumah yang layak huni. Peningkatan pengembangan diri adalah rumah-rumah yang dibentuk atas dorongan dan usaha daerah setempat, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok yang meliputi perbaikan, pembangunan

kembali/perluasan atau pengembangan rumah baru dan keadaannya saat ini.

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) adalah perangkat keras dan kantor penting yang diperlukan agar rumah dan iklim dapat bekerja dengan baik dan aman. Penataan energi untuk penguasaan perbaikan diri ini diharapkan dapat mendukung Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKNB) untuk bekerja sama dalam pemeliharaan/pembangunan rumah atau penguasaan melalui pembiayaan yang efektif terbuka untuk MBR dan untuk mendesak negara-negara terdekat untuk bekerja dengan pelaksanaan kemajuan penguasaan perbaikan diri. Alasan untuk bantuan penguasaan perbaikan diri adalah untuk memungkinkan orang miskin memiliki pilihan untuk membuat atau bekerja pada sifat rumah mereka secara bebas. Penerima manfaat dari bantuan energizer penguasaan pengembangan diri adalah MBR. Tujuan dari program pengembangan diri penguasaan energizer adalah

- 1 Tersalurannya stimulan perumahan swadaya melalui LKM/KNB di Kecamatan/Desa
- 2 Penyampaian tenaga penguasaan swadaya kepada MBR yang memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan pembiayaan

penguasaan perbaikan diri dengan tidak terlalu bergantung pada daftar pelaksanaan rencana belanja satuan kerja.

- 3 Peningkatan batas aset penguasaan pada pelayanan pekerjaan umum dan penguasaan umum.
- 4 Pelaksanaan batas kelembagaan yang bekerja dalam pelaksanaan perbaikan diri penguasaan di daerah dan kecamatan/kota. BPS yang diharapkan dapat membantu keluarga miskin dan berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang terlindungi dan layak melalui proses perbaikan tertentu. Pelaksanaan program ini telah dilakukan mulai sekitar tahun 2020 di Desa Sutera dan telah menunjukkan kemajuan dalam mencapai bantuan untuk keluarga pedesaan khususnya untuk jaringan nelayan di tepi pantai.

C. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini memaparkan masalah bantuan rumah nelayan yang sangat minim sedangkan masyarakat yang terdata sebagai pekerja nelayan sangatlah banyak sehingga yang mendapatkan bantuan tersebut tidak merata penelitian ini

berdasarkan data maupun fakta dan informasi yang ada di lapangan. Melakukan penelitian merupakan aktivitas yang memerlukan proses berfikir dengan mengasah dan mengembangkan rasa ingin tahu tentang fenomena sosial, yakni keadaan sosial yang ada di masyarakat yang pernah atau yang sedang dilihat, difikirkan dan dirasakan (diamati). Untuk menggambarkan secara mendalam mengenai masalah pengelolaan BPSP bantuan rumah nelayan yang sangat minim di Desa Sutera Kabupaten Kayong Utara maka diperlukan mengumpulkan data lapangan. Informasi atau data yang hendak dikumpulkan adalah tentang masalah bantuan rumah nelayan yang kurang optimal. Sesuai dengan permasalahan penelitian yang di ambil dan tujuan yang hendak dicapai adalah menggambarkan permasalahandilapangan maka menggunakan pendekatankualitatif.

D. Pembahasan

Upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat merupakan kewajiban pemerintah. Tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah menekan angka kemiskinan di dalam negeri. Dengan berkurangnya angka kemiskinan, maka negara akan menjadi negara yang makmur. Usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

Desa Sutera adalah dengan memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau rumah tidak layak huni kepada masyarakat berpenghasilan rendah salah satunya di Desa Sutera yaitu masyarakat nelayan pesisir.

Setiap penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus mengetahui syarat-syarat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hal ini tentu sangat penting untuk menunjang kelancaran pembangunan perumahan, seluruh masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) wajib memenuhi syarat admistrasi yang dilakukan di Desa Sutera yang di atur Kepala Desa dan Stafnya sesuai dengan syarat-syarat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dipimpin di Desa Sutera dipercaya memiliki opsi untuk memperkuat atau membujuk jaringan nelayan tepi pantai dengan yayasan bergaji rendah untuk membangun atau mengembangkan lebih lanjut kondisi penginapan yang tidak cocok untuk tempat tinggal. Pada dasarnya, kondisi keuangan yang tidak berdaya merupakan alasan kuat yang melatarbelakangi mereka untuk tidak mempertimbangkan membangun rumah meskipun keadaan rumahnya sedang tidak

nyaman. Jaringan nelayan tepi pantai fokus pada makanan dan kebutuhan anak-anak, misalnya kebutuhan untuk membeli beras dan sekolah untuk anak-anak mereka. Padahal, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) benar-benar memacu jaringan nelayan tepi pantai untuk merakit dan memperbaiki rumah mereka, dan semua jaringan nelayan tepi laut yang memenuhi prasyarat manajerial segera mendapat bantuan jenis Rp 10.000.000 untuk setiap rumah yang mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Sutera mengungkapkan bahwa pemberian bantuan rumah tidak layak huni kepada masyarakat nelayan pesisir yang berpenghasilan rendah telah ada sejak tahun 2020 namun karena di Desa Sutera merupakan tercepat dalam penyelesaiannya, hanya satu bulan lebih yaitu lebih cepat dari waktu yang diberikan yaitu dua bulan, dan pada tahun 2021 di Desa Sutera diminta mendata lagi masyarakat nelayan pesisir yang belum mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni untuk mendapatkan bantuan BSPS. Sebelum diberikan bantuan ada pemeriksaan terlebih dahulu dari perangkat desa agar mengetahui kondisi rumah masyarakatnya kemudian di data

dan di laporkan kepada Dinas Sosial.

Selanjutnya diadakan penyuluhan dengan tujuan memperkenalkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut dengan masyarakat nelayan pesisir yang tercatat namanya sebagai penerima bantuan. Kepala Desa Sutera mengungkapkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bukanlah bantuan dari Desa tetapi bantuan ini program bantuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat yang kemudian diturunkan ke Dinas Sosial dan diajukan oleh Desa agar di salurkan kepada masyarakat di Desa Sutera dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan di Desa Sutera dan memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

E. Simpulan

1. Kesimpulan

Melihat penjelasan-penjelasan pada bagian sebelumnya, dapat diduga bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah program yang dibuat oleh Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Penginapan Swadaya adalah rumah tinggal berdasarkan dorongan dan usaha daerah setempat yang meliputi

perbaikan, pembangunan/perluasan atau pembangunan rumah baru yang layak huni sebagai tempat tinggal. Alasan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah untuk mendesak jaringan bergaji rendah untuk membangun rumah mereka sendiri yang tertahanan, kokoh dan aman. Tujuannya adalah untuk merakit rumah yang tahan banting, kokoh dan aman. Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) difokuskan pada jaringan berbayar rendah (MBR). Untuk jaringan bergaji rendah, ada aturan berbeda yang memasukkan penerima bantuan memiliki KTP, kartu keluarga, wilayah sendiri dan memiliki sertifikat tanah dan tanah tidak dalam kondisi dipertanyakan.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memberikan perubahan yang cukup baik dengan meningkatkan kualitas tempat tinggal warga dan kesejahteraan, meski demikian masyarakat mengeluh mengenai dana untuk menambah upah tukang, mengangkut bahan bangunan sendiri, dan menambah biaya jika terjadi kekurangan dalam proses pembangunan. mereka sangat sulit dalam mencari dana tambahan sehingga harus berhutang dan menjual hak tanah milik mereka sendiri. Dapat dikatakan/program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) cukup efektif

untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni tetap belum optimal..

2. Saran

Setiap pendekatan atau program yang diberikan oleh otoritas publik jelas menikmati manfaat dan bebannya sendiri. Oleh karena itu, ide-ide diharapkan bekerja pada sifat pengaturan atau proyek saat ini dan masa depan. Demikian pula, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Berikut ini adalah saran untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) :

- a) Berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh selama penelitian berlangsung, perlu adanya gotong royong dari masyarakat agar dapat mengurangi beban dalam pemberian tambahan upah tukang sehingga masyarakat tidak menjual hak warisan yang dimiliki dan menanggung beban hutang yang menjadi tanggung jawab mereka.
- b) Perlu adanya pertimbangan dari pemerintah tentang bagaimana masyarakat nelayan pesisir agar bisa mengangkut bahan bangunan yang mereka beli, karena masih banyak masyarakat nelayan pesisir tidak memiliki kendaraan pribadi

harus mengaji orang untuk mengangkut bahan bangunan.

- c) Perlu adanya pertimbangan dalam waktu pengerjaan karena jika waktu pengerjaan bisa di perpanjang jika belum selesai dan tidak diberikan sanksi maka tidak terjadi beban hutang, dengan catatan jika belum selesai harus menyelesaikan dan harus diawasi.

F. Daftar Pustaka

Referensi Buku:

Alexander. 1994. *Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Damser. 2009. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.

Deddy Tikson. 2005. *Pembangunan Ekonomi*. Bandung: Alfabeta.

Harun, Rochajat & Elvinaro Ardianto. 2011. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Horton, Paul B & Chester L.Hunt. 1999. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga.

Horton, Paul & Chester L.Hunt,1999. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.

Idrus M. 1992. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT.Geora Aksara.

Irwan & Indraddin 2016. *Strategi dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, CV budi utama.

Kusnadi. 2009. *Ciri-Ciri Masyarakat*

Mirnowati. NIM.E1022171062

Program Studi Ilmu Pembangunan Sosial FISIP Untan

Nelayan. Bandung: Alfabeta.

Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modern, dan Poskolonial*. Jakarta: PT. Rajagrafindo perseda.

Pratama Irwan & Indraddin. 2016. *Strategi dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, CV Budi Utama.

Parwardi, Redatin. 2009. *Sosiologi Pembangunan*. Pontianak: Untan Press.

Soejono Soekamto. 1990. *Teori Perubahan Sosial*. Jakarta:Kencana.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Selo Sumarjan.1974. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.

Salim, Agus. 2002. *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: PT Tiara wacana.

Skripsi :

Martono, Nanang, 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, dan Poskolonial*, Jakarta : PT RajaGrafindo Perseda Skripsi ; Kabupaten Bengkayang . Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura.

Tama, Sintya Bela, 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Way Halim Perna dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota*

Bandar Lampung. Skripsi Fakultas
Ilmu. Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Lampung.

dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura.

Riztisyah, Irwa Juarig. 2017. Pengaruh
Keberadaan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) Wahana Visi
Indonesia Terhadap Perubahan
Sosial Masyarakat di Kelurahan
Batu Layang Kecamatan Pontianak
Utara. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial

Internet :

<http://dr.suparyanto.blogspot.com/2011/04/masyarakat-miskin.html>

